Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma
Vol. 4, No. 1, 68-83
P-ISSN: 1412-9426 E-ISSN: 2745-4185)

Demokrasi di Mata Anak Muda: Studi Representasi Sosial

Victorius Didik Suryo Hartoko
Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma
https://doi.org/10.24071/suksma.v4i1.6049

Naskah Masuk 6 Maret 2023 Naskah Diterima 17 April 2023 Naskah Dipublikasikan 5 Mei 2023

Abstract. How do young people understand democracy? This study tries to find out the ideas of young people about democracy and its basic structure using the Social Representation approach. Young people aged between 17 to 33 years (N = 237 people) participated in this study. Data collection was carried out using a survey technique by asking them what they thought about democracy and what values they saw as the basic values of democracy. The three main ideas of young people about democracy are freedom of opinion (63.98%), plurality and equality (62.03%) and justice (48.52%). These three ideas are basic values for the formation of assertive citizens and at the same time reflect the need for young people to be independent and participate. Multidimensional scaling statistical techniques are used to summarize and capture the basic structure of 13 ideas about democracy. There are two main dimensions found. The first dimension describes democracy as a tension between the ideas of liberal democracy (freedom of opinion and equality-plurality) and the idea of integralism (prosperity, unity, law and order, responsibility and honesty). The second dimension describes democracy as the tension between the principles of justice and the principles of people's sovereignty (people's sovereignty, deliberations, general elections and togetherness). These two dimensions may reflect the history of the democratic experience of the Indonesian people who have experienced various trials of applying different ideas about democracy.

Keywords: democracy, social representation, multidimensional scaling, assertive citizens

Pendahuluan

Demokrasi dimengerti secara berbeda-beda di antara kelompok bangsa maupun kurun waktu yang berbeda. Pengertian yang paling populer adalah "pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat" yang menitikberatkan pada persoalan kedaulatan rakyat (Cunningham, 2002). Pengertian lain yang sama populernya adalah proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan kolektif yang melibatkan setiap orang terkait secara setara (Beetham & Boyle, 2000). Rakyat berkuasa diartikan

Korespondensi Penulis
Victorius Didik Suryo Hartoko, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Email: didiksuryo@usd.ac.id

sebagai rakyat yang berkuasa atas hukum yang menguasainya (Barbu, 2010). Warga negara secara langsung maupun tak langsung berperan sebagai pembuat hukum bukan sekedar subjek hukum yang memungkinkan setiap warga untuk menjamin dirinya terbebas dari tekanan dan dapat merancang cara hidupnya sendiri (Przeworski, 2010). Di luar pengertian dasar itu juga terdapat pengertian yang lebih prosedural yaitu pemilihan umum. Negara-negara otoriter dapat mengklaim dirinya menjalankan pemerintahan demokrasi dengan menunjukkan adanya pemilu.

Sikap dukungan dan keanekaragaman pemahaman orang awam terhadap demokrasi merupakan kajian yang panjang mulai dari tulisan klasik, *The Civic Culture* yang ditulis oleh Almond dan Verba (1963) hingga kajian-kajian yang dilakukan Ronald Ingelhart dan kawan-kawan tentang perubahan nilai-nilai demokrasi yang didasarkan atas studi survei luas tentang gagasan demokrasi kaum awam, yakni warga negara biasa yang tidak terlibat secara langsung dalam keputusan politik dari berbagai negara (*World Value Survey*) (Dalton & Welzel, 2014; Welzel & Dalton, 2016). Ada dua model sikap demokratis warga negara terhadap pemerintahan, yakni sikap kewargaan loyal dan sikap kewargaan asertif.

Sikap kewargaan loyal mencakup loyalitas pada sistem pendukung demokrasi, keyakinan pada institusi, konformitas pada nilai dan norma sosial, rasa percaya pada sesama warga negara, minat politik berfokus pada pencapaian hasil dari kebijakan pemerintah serta partisipasi politik yang terbatas pada pemilu (Almond & Verba, 1963), sedangkan sikap kewargaan asertif berpusat pada kebebasan individu, kesetaraan kesempatan dan keberanian bersuara untuk mempengaruhi kebijakan publik (Welzel & Dalton, 2016). Sikap kewargaan asertif ini merupakan gejala yang mulai timbul ketika demokrasi telah menjadi satu-satunya cara untuk berkonstetasi di ruang publik. Warga negara loyal pada aturan main demokrasi di satu sisi dan di sisi lain mulai bersikap kritis terhadap pemerintah, memperhatikan input, proses dan output pemerintah, dan cenderung menyamakan peran warga negara seperti halnya kaum aktivis (Dalton & Welzel, 2014).

Masyarakat Indonesia memiliki pengalaman berdemokrasi yang bervariasi. Minimal ada dua gagasan demokrasi yang menonjol, yakni demokrasi liberal yang diklaim berkembang di Indonesia pada tahun 1949 sd 1959 (demokrasi parlementer) dan setelah tumbangnya pemerintahan otoritarian Soeharto serta gagasan integralisme yang muncul di awal pembentukan republik Indonesia di dalam rapat BPUPKI, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965 serta pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sd 1998 (Bourchier, 2007). Dua gagasan tersebut memiliki kedekatan dengan varian sikap kewargaan yang loyal (negara integralis) dan kewargaan asertif (demokrasi liberal). Tumbangnya pemerintahan Suharto tahun 1999 memperkuat kecenderungan sikap kewargaan asertif seperti tergambar dari hasil *World Value Survey* tahun 1999 dan tahun 2004 (Dalton, Shin, & Jou, 2007). Demokrasi sebagai kebebasan dan hak meningkat dari 9% menjadi 29 %, demikian pula sebagai proses politik dari 8% menjadi 20 %, sedangkan demokrasi sebagai kemanfaatan sosial menurun dari 25% menjadi 7%.

©2023 Hartoko

Gagasan warga biasa tentang demokrasi dapat dipandang sebagai representasi sosial tentang demokrasi. Salah satu pendekatan Psikologi Sosial yang juga dikenal sebagai Representasi Sosial memusatkan perhatian pada pengetahuan kolektif sekelompok orang di suatu masa. Semula pertanyaan dasar yang diajukan adalah bagaimana pengetahuan berkembang dalam pengalaman hidup sehari-hari, kemudian meluas memperhatikan representasi dan konstruksi objek-objek tertentu (misalnya kesehatan, kesakitan atau kegilaan) (Flick, 1998). Representasi sosial suatu objek merupakan pengetahuan sehari-hari yang dimiliki, dialami dan digunakan untuk mengatur diri sendiri di dalam hubungannya dengan kenyataan maupun orang lain. Individu mempergunakan pengetahuannya untuk mengorientasikan dirinya di dalam lingkungan material maupun sosial. Melalui pengetahuan tersebut individu dapat mengkomunikasikan pengalamannya kepada orang lain.

Representasi sosial memiliki sifat kolektif, dalam arti pengetahuan, keyakinan maupun praktek sehari-hari itu berkembang dalam lingkungan kehidupan sosial tertentu, semacam *common sense* yang dipahami bersama dan sekaligus memungkinkan anggotanya untuk merasa memiliki dunia yang sama (Moscovici, 1998). Representasi sosial memiliki fungsi menciptakan dunia yang terpahami bersama. Dalam bahasa yang lebih teknis: familiarisasi, membuat hal yang asing, yang baru dan tak terpahami menjadi hal yang lebih mudah terpahami (von Cranach, 1998). Kajian representasi sosial berupaya untuk menangkap bagaimana suatu objek direpresentasikan dalam pembicaraan sehari-hari dan gagasan apa yang dipergunakan untuk mem"familiarisasikan" objek tersebut.

Penelitian ini akan mengumpulkan gagasan-gagasan awam mengenai demokrasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Keseluruhan gagasan itu akan menjadi semesta pembicaraan mengenai demokrasi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, peneliti tidak akan mengklasifikasikan jawaban berdasarkan kategori yang sudah dipilih sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Dalton, Shin dan Jou (2007), tetapi akan menggunakan pendekatan yang lebih induktif yaitu Representasi Sosial untuk membandingkan dimensi gagasan tentang demokrasi yang ditemukan dalam semesta pembicaran demokrasi orang awam dengan dimensi ideologis yang tampak dalam sejarah gagasan demokrasi di Indonesia.

Kajian Representasi Sosial gagasan demokrasi anak muda Indonesia memiliki relevansi untuk memetakan motif-motif idologis sekaligus motif-motif psikologis yang dimiliki anak muda terkait demokrasi. Tidak banyak studi yang mencoba memahami hal tersebut selain kajian Dalton, Shin dan Jou (2007) serta kajian kajian Welzel dan Dalton (2016) yang menunjukkan pergerakan dari sikap loyal menuju sikap asertif. Pemahaman orang awam tentang demokrasi serta motif-motif dasarnya berpotensi untuk menjadi kerangka tafsir kaum awam terhadap peristiwa politik maupun penilaian terhadap kinerja pemerintahan demokratis yang pada gilirannya kemudian akan mengarahkan tindakan politisnya.

Penelitian ini secara khusus mencoba melihat gagasan anak muda tentang demokrasi, salah satu segmen masyarakat yang paling cepat menyerap suara-suara dari banyak sisi dunia yang didominasi oleh gagasan demokrasi liberal. Di saat yang sama kaum muda Indonesia hidup dalam masyarakat yang

©2023 Hartoko

cukup lama berkubang dalam gagasan negara integralistik (Bourchier, 2007). Ketegangan ini boleh jadi akan termanifestasikan dalam gagasan-gagasan yang mereka ungkapkan tentang demokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan Representasi Sosial untuk mengeksplorasi pemahaman anak muda mengenai demokrasi. Representasi Sosial mencoba menangkap gagasan-gagasan dasar yang menstrukturisasi pemahaman suatu kelompok masyarakat mengenai objek tertentu. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menangkap representasi sosial suatu objek gagasan (Sotirakopoulou & Breakwell, 1992). Metode survei kualitatif digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk memperoleh data dalam jumlah yang besar. Jawaban para responden akan diperlakukan sebagai data kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada awal tahun 2017, ketika kesadaran politik mulai menguat lagi menjelang pemilu 2019.

Partisipan penelitian ini adalah kelompok anak muda, mahasiswa yang berusia antara 17 sampai dengan 33 tahun dengan rerata usia 20,3797. Responden penelitian ini berjumlah 237 mahasiswa dari sebuah universitas di Yogyakarta yang mencakup 139 orang perempuan (58,64%) dan 98 orang lelaki (41,35%). Responden berasal dari berbagai etnis di Indonesia. Sebagian besar berasal dari suku bangsa jawa, yakni 132 orang (55,69 %), suku Bali 27 orang (11,39%), Tionghoa 25 orang (10,55 %), Batak 14 orang (5,9%) dan selebihnya adalah suku Manado, Flores, Dayak dan Betawi. Metode sampling yang digunakan adalah *covenience sampling*. Penggunaan kelompok mahasiswa sebagai responden boleh jadi akan mengurangi daya generalitas dari temuan ini. Mahasiswa adalah kelompok terdidik yang boleh jadi hanya mencerminkan sikap kelas menengah Indonesia ketimbang sikap masyarakat awam pada umumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta responden untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, apa yang muncul dalam pikiran responden ketika mendengar kata demokrasi. Responden diminta untuk menuliskan tiga hal yang muncul dalam pemikirannya. Kemudian responden juga diberi kesempatan untuk menjelaskan maksud tiga hal tersebut secara tertulis. Kedua responden diminta menuliskan tiga nilai demokrasi yang mereka pahami. Jawaban-jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua digabungkan untuk menemukan konsepsi-konsepsi mengenai demokrasi. Peneliti melakukan analisis isi terhadap jawaban responden dan kemudian mengklasifikasikannya. Selain dua pertanyaan pokok tersebut, lembar survei yang dibagikan juga meminta responden untuk mengisi data demografis seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan etnis.

Secara ringkas pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh penelitian ini adalah pertanyaan deskriptif, bagaimana demokrasi dipahami oleh kaum muda awam, yaitu kaum muda warga masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam dunia politik secara profesional. Di samping itu penelitian ini juga akan mencoba melihat apakah terdapat variasi pemahaman tentang demokrasi antar jenis kelamin maupun

©2023 Hartoko

antara kelompok muda (usia 20 tahun ke bawah) dan kelompok usia lebih dewasa (usia 21 tahun ke atas).

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif analisis isi serta metode statistik Multidimensonal Scaling (ALSCAL). Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi jawaban berdasarkan apa yang muncul dari jawaban. Peneliti tidak memiliki kerangka kategori tertentu untuk mengelompokkan jawaban. Unit yang dipakai pada analisis awal adalah unit kategori jawaban tiap-tiap responden. Jika seorang responden memberikan dua atau lebih jawaban yang dapat dikategorikan dalam satu kategori, kategori tersebut dihitung satu. Tiap responden diberi kesempatan menyatakan pemahaman dalam enam jawaban Keseluruhan jawaban responden yang sudah dikategorikan membentuk satu semesta pemahaman mengenai demokrasi.

Pada analisis selanjutnya untuk menemukan pola jawaban, unit yang dipakai adalah responden. Dengan menggunakan kategori-kategori jawaban yang dinyatakan tiap responden, peneliti mengelompokkan semua jawaban responden ke dalam 13 kategori jawaban. Peneliti kemudian melakukan analisis statistik Multidimensional Scaling terhadap ketigabelas kategori jawaban tersebut untuk menemukan tingkat kedekatan antar kategori jawaban yang dipetakan dalam dua dimensi. Kategori-kategori jawaban yang saling berdekatan dapat dipandang memiliki makna yang serupa. Berdasarkan pengelompokan itu dapat diketahui muatan-muatan yang menyatukan dan membedakan pengolompokan tersebut. Untuk mengetahui apakah terdapat variasi jawaban berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok usia muda dan dewasa, peneliti akan memasukkan variabel jenis kelamin dan tingkat usia sebagai variabel *dummie*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gagasan-gagasan tentang demokrasi

Analisis isi dan klasifikasinya menunjukkan ada 13 kategori gagasan yang berkembang di antara anak muda. Rerata jumlah jawaban berdasarkan 13 kategori tersebut adalah 4,1730 jawaban. Tidak ada perbedaan jumlah jawaban antara kelompok lelaki (rerata jumlah jawaban 4,0612) dan perempuan (rerata jumlah jawaban 4,2518) dengan nilai t = -1,081 (p > 0,005), maupun antara kelompok muda (rerata jumlah jawaban 4,1321) dan kelompok dewasa (rerata jumlah jawaban 4,2564) dengan nilai t= 1,801 (p> 0,05). Ketigabelas kategori jawaban beserta contoh jawaban dan persentase penjawabnya akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini mulai dari jawaban terbesar.

Demokrasi dari hasil penelitian ini dapat dipahami sebagai suatu nilai, proses maupun sifat-sifat ideal manusia. Sebagai nilai demokrasi adalah kebebasan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, hormat pada orang lain atau pihak lain dan toleransi. Sebagai prosedur atau praktek politik ia muncul dalam kategori: musyawarah, pemilu, tertib hukum dan kebebasan berbicara, sedangkan sebagai keadaan ideal ia muncul sebagai ketertiban, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan persatuan. Kategori-kotegori

©2023 Hartoko

tersebut memiliki potensi untuk menjadi kriteria bagi kaum awam untuk menilai legitimasi kebijakan pemerintah maupun menilai keadaan negaranya.

Tabel 1.
Tema dan Popularitasnya

	Kategori jawaban	Contoh isi	presentase
1	Kebebasan berpendapat	Kebebasan berpendapat; hak berpendapat; menyampaikan pendapat tanpa ditekan	63,9831
2	Pluralitas dan kesetaraan	Tidak memandang status; terbuka; terbuka untuk setiap pendapat; setara; hak yang sama tanpa melihat latar belakang; menghargai argumen orang lain; toleran; Bhineka Tunggal Ika; mengahargai perbedaan	62,0253
3	Keadilan	Adil; keadilan; berimbang	48,523
4	Musyawarah-mufakat	Budaya musyawarah; mufakat; menyelesaikan masalah dengan musyawarah	35,443
5	Kedaulatan rakyat	Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat; kedaulatan rakyat; kekuasaan dari rakyat	32,9114
6	Pemilu	Keputusan yang diambil berdasarakan keterwakilan suara; bebas memilih; pemilu; suara terbanyak	30,3797
7	Hukum dan ketertiban	Tertib dan damai; ruwet tidak ada yang membatasi kebebasan; apa yang dibuat pemerintah sesuai dengan Undang-Undang	26,5823
8	Kebebasan dan hak asasi manusia	sangat humanis; bebas; bebas tetapi ada batasan; hak asasi setiap orang dijamin Negara; tidak ada tekanan dari pihak lain; freedom	25,7384
9	Kebersamaan dan gotongroyong	Kesepakatan bersama demi kesejahteraan; kebersamaan; tujuan bersama; dilakukan untuk kepentingan bersama	24,4726
10	Kejujuran dan transparansi	Jujur; transparansi; tidak ada manipulasi	23,207
11	Kesejahteran	Demi kesejahteraan umum; kesejahteraan rakyat	18,9873
12	Tanggungjawab	Bertanggung jawab; komitmen; penuh tanggungjawab	13,502
13	Persatuan	Mempersatukan yang berkonflik; mengesampingkan semua perbedaan untuk bersatu; persatuan lapisan masyarakat	11,3924

Berdasarkan pengelompokan prosentase jumlah penjawab di atas tampak bahwa nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan berbicara, pluralitas-kesetaraan dan keadilan menduduki tempat paling populer disusul oleh gagasan-gagasan tentang kehendak rakyat (musyawarah, kedaulatan rakyat dan

©2023 Hartoko

pemilu). Temuan ini sejalan dengan temuan Dalton, Shin dan Jou (2007), yaitu adanya kenderungan penguatan model demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat, pluralitas-kesetaraan dan keadilan, yang lebih bersifat asertif dan mengarah pada pembentukan warga yang lebih aktif dalam kehidupan politik (Dalton & Welzel, 2014). Pengutamaan nilai-nilai liberal (kebebasan berpendapat, keadilan dan pluralitas-kesetaraan) ini juga menyerupai hasil penelitian Moodie & Markova (1995) yang di lakukan di Slovakia dan Scotland. Popularitas tiga nilai dasar tersebut memberikan harapan untuk berkembangnya kehidupan politik di masa depan, namun asertifitas yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang berorientasi generatif, pemeliharaan masyarakat dapat berujung pada perpecahan.

Beberapa kategori jawaban di atas dapat dikelompokkan menurut model sikap kewargaan loyal dan asertif. Sifat kewargaan loyal bertumpu pada nilai-nilai yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan masyarakat, rasa saling percaya antar sesama warga, minat politik yang terbatas pada kesejahteraan dan partisipasi politik yang terbatas pada pemilu (Almond & Verba, 1963). Sifat kewargaan loyal di dalam hasil penelitian ini ditunjukkan oleh kategori musyawarah mufakat, kejujuran dan transparansi, tanggung jawab, persatuan, kebersamaan dan gotong royong, hukum dan ketertiban, kesejahteraan serta pemilu. Sifat kewargaan asertif bertumpu pada kebebasan individual, keberanian bersuara, serta kesetaraan (Dalton & Welzel, 2014; Welzel & Dalton, 2016). Di dalam penelitian ini sifat kewargaan asertif tampak pada kategori kebebasan berbicara, pluralitas dan kesetaraan, keadilan serta kebebasan dan hak asasi manusia. Kategori kedaulatan rakyat tidak dapat dimasukkan dalam salah satu model sifat kewargaan karena maknanya terlalu ambigu. Tidak jelas apakah kedaulatan rakyat tersebut merujuk pada kehendak untuk otonom ataukah sekedar definisi normatif yang diajarkan di sekolah tingkat rendah, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di dalamnya mengandung arti asertif (dari dan oleh rakyat) maupun loyal (untuk rakyat). Kemunculan jawaban-jawaban loyal maupun asertif secara spontan tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan budaya politik ke dalam model loyal dan asertif bukanlah pengkategorian teoretik belaka. Temuan ini menambah dukungan empiris atas kategori-kategori tersebut.

Kemunculan dua model tersebut dalam gagasan spontan juga menunjukkan adanya keseimbangan pemahaman mengenai demokrasi di kalangan anak muda terdidik. Kaum muda tidak hanya menyadari perannya sebagai subjek agentif yang menuntut hak-haknya tetapi juga subjek yang bertanggungjawab terhadap proses-proses pembentukan kesatuan kebangsaan. Studi yang dilakukan Welzel dan Dalton (2014) memperlihatkan bahwa akuntabilitas pemerintahan lebih ditentukan oleh budaya demokrasi asertif (kebebasan, kesetaraan dan suara) sedangkan kestabilan dan efektivitas jalannya pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh budaya demokrasi yang bersifat loyal (kepercayaan pada institusi; keyakinan philantropik; ketaatan pada norma). Tampaknya kaum muda lebih memilih jalan tengah di antara kebebasan dan tanggungjawab.

Kajian-kajian model demokrasi di Asia Timur mengedepankan apa yang disebut sebagai nilai-nilai Asia yang berbeda dari nilai-nilai universal yang dipandang sebagai nilai budaya barat (Kim, 2010). Nilai-nilai budaya Asia menekankan pada familisme, komunalisme, orientasi pada otoritas serta etika

©2023 Hartoko

kerja yang oleh sebagian besar pemimpin Asia di era tahun 1990 an dimanfaatkan sebagai legitimasi atas kecenderungan pemerintahan yang bersifat otoritarian dan didengungkan cukup kuat oleh kaum relativisme budaya seperti tesis perang peradabannya Huntington (1996). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tesis relativisme budaya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, responden kaum muda tidak sepenuhnya terbenam dalam nilai-nilai loyalitas. Gagasan-gagasan yang menekankan otonomi dan assertivitas juga mendapat tempat dalam pemikiran mereka.

Otonomi dan generativitas

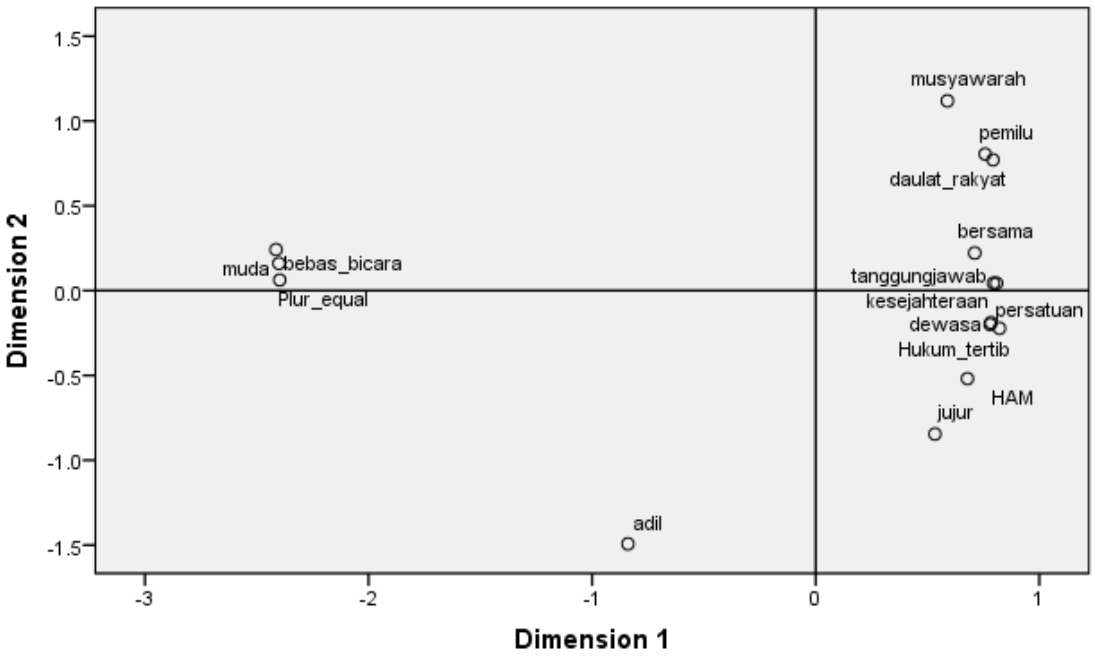
Popularitas nilai-nilai asertifitas di kalangan anak muda dapat dipahami dalam kerangka perspektif psikologi perkembangan. Kebebasan berbicara, pluralitas-kesetaraan maupun keadilan memiliki daya tarik yang lebih kuat di banding gagasan lainnya bagi anak muda karena keduanya dapat mengekspresikan keinginan dasar mereka untuk mandiri ketika berada dalam masa pembentukan identitas (Erikson, 1987). Perhatian kaum muda lebih terarah pada pembentukan diri ketimbang kepada proses atau prosedur pembentukan kehendak rakyat, maupun nilai-nilai kesetiaan dan loyalitas warga. Nilai-nilai yang menekankan pada pembentukan kolektivitas seperti gagasan kesejahteraan rakyat, hukum dan ketertiban, persatuan, maupun tanggungjawab sebagai warga negara belumlah menjadi nilai utama mereka. Selain itu pemahaman kaum muda tentang realitas banyak diwarnai oleh berkembangnya kemampuan berpikir abstrak formal yang memungkinkan mereka untuk menggeluti persoalan-persoalan abstrak . Gagasan ideal dan abstrak seperti kebebasan, kesetaraan dan keadilan menjadi lebih menarik bagi mereka.

Apakah dorongan yang terkait usia perkembangan mengarahkan model pemahaman yang berbeda? Hasil penelitian dengan menggunakan teknik multidimensional scaling memperlihatkan perbedaan tingkat kedekatan antar berbagai gagasan demokrasi (13 gagasan) dengan dua tingkat usia, yaitu muda (usia 17 sampai dengan 20 tahun; N= 159 orang atau 67,1 persen) dan dewasa (usia 21 tahun sampai dengan 33 tahun; N=78 orang atau 32,9 persen). Kelompok muda lebih dekat dengan gagasan-gagasan liberal (kebebasan berpendapat dan pluralitas-kesetaraan) sedangkan kelompok yang lebih dewasa usianya lebih dekat dengan gagasan-gagasan kesejahteraan, persatuan, tanggung jawab, hukum dan ketertiban. Gagasan keadilan berada di tengah-tengah antar polaritas usia tersebut.

©2023 Hartoko

Gambar 1.

Perbedaan gagasan-gagasan demokrasi usia muda dan dewasa



Hasil analisis tersebut memperlihatkan adanya polaritas makna berdasarkan tingkat usia perkembangan seseorang. Ada dua kemungkinan penjelasan, pertama dengan mengacu pada dorongan otonomi serta dorongan generativitas. Partispan lebih muda lebih mementingkan dorongan otonomi sedangkan partisipan lebih tua lebih mementingkan dorongan pemeliharaan dan generativitas. Hasil ini sesuai dengan gambaran tingkat perkembangan Erikson (1987). Penjelasan kedua berkait dengan perubahan ideologi demokrasi di Indonesia. Sebelum reformasi politik tahun 1998 ideologi demokrasi Indonesia lebih mengacu pada gagasan-gagasan demokrasi integralisme ketimbang gagasan demokrasi liberal. Partipan yang lebih tua lebih banyak menyerap gagasan lama sedang partispan yang lebih muda lebih banyak menyerap gagasan liberal yang mengutamakan otonomi individual.

Variasi gagasan demokrasi berdasarkan jenis kelamin

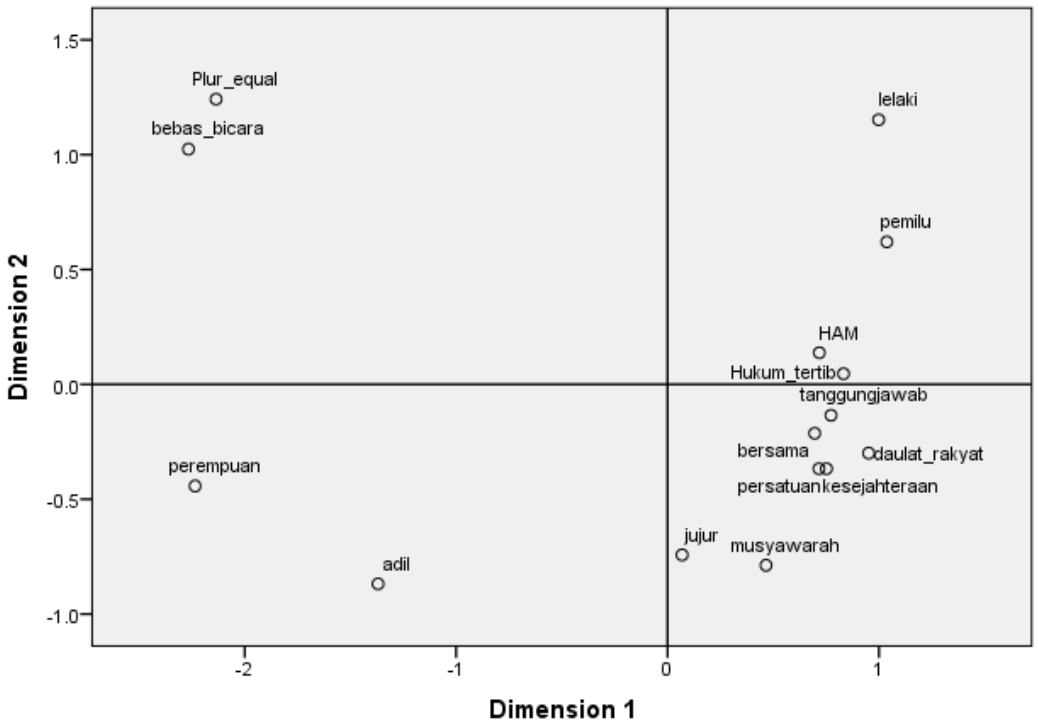
Hasil analisis multidimensional scaling dengan memasukkan variabel jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung lebih dekat dengan gagasan pemilu, sedangkan perempuan lebih dekat dengan gagasan kedilan. Secara garis besar perempuan cenderung lebih dekat pada sikap kewargaaan asertif (keadilan, pluralitas dan kesetaraan, serta kebebasan berbicara) sedangkan lelaki lebih cenderung pada sikap kewargaan loyal (pemilu, hukum dan ketertiban, tanggungjawab, dan kebersamaan) serta salah satu sifat kewargaan asertif yakni kebebasan dan hak asasi manusia. Keduanya memiliki jarak yang kurang lebih sama dengan gagasan kesejahteraan, kejujuran, kedaulatan rakyat dan musyawarah.

©2023 Hartoko

Temuan di atas menyerupai hasil dari penelitian Kesici (2008) tentang perbedaan keyakinan mengenai demokrasi pada para guru sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas di Turki. Guru perempuan memiliki skor yang lebih tinggi dibanding guru lelaki pada keyakinan mengenai keadilan atau dengan kata lain mereka memandang keadilan lebih penting ketimbang guru lelaki. Sedangkan keyakinan terkait kebebasan, dan kesetaraan maupun nilai total keyakinan akan demokrasi tidak berbeda dengan guru lelaki. Temuan yang senada juga terdapat pada hasil penelitian Hansen dan Goenaga (2021) yang menggunakan hasil survei dari European Social Survey tahun 2012. Perempuan lebih memprioritaskan institusi demokratis yang menjamin kesetaraan sipil, politik dan hak-hak sosial, lebih memprioritaskan institusi yang menjamin partisipasi langsung dan kurang mementingkan persoalan pemilu maupun partai politik ketimbang lelaki. Argumen dasar dari dua temuan itu serupa. Perempuan merasakan ketidakadilan gender. Mereka merasa demokrasi memiliki nilai penting jika dapat menjamin rasa keadilan dan kesetaraan, serta memungkinkan mereka untuk dapat lebih berperan dalam persoalan publik. Pemilu maupun partai politik dipandang kurang penting karena lebih dekat dengan kekuasaan yang dalam sebagian besar menjadi hak istimewa lelaki dalam budaya yang cenderung patriarkis.

Gambar 2.

Perbedaan gagasan demokrasi antara lelaki dan perempuan



Hasil penelitian perbedaan perempuan dan lelaki dalam memahami demokrasi ini tampaknya menunjukkan potensi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam kehidupan politik khususnya terkait dengan persoalan-persoalan keadilan. Lelaki cenderung lebih loyal pada sistem dan norma yang belaku

©2023 Hartoko

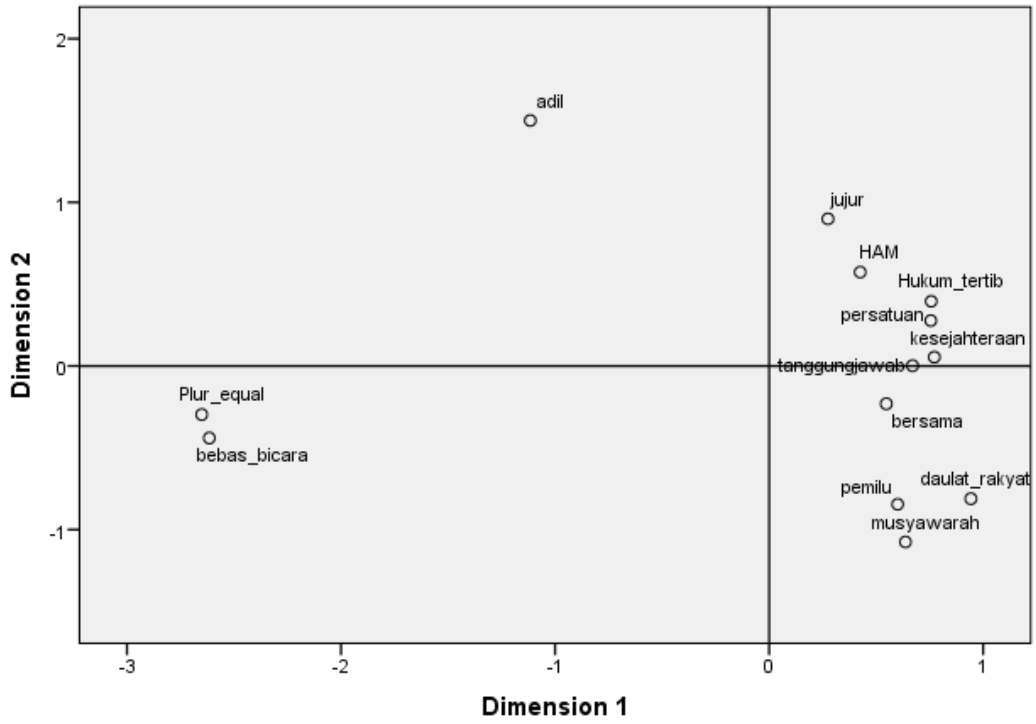
saat ini ketimbang perempuan, dengan kata lain lebih tradisional ketimbang perempuan. Loyalitas ini mungkin terkait dengan situasi yang lebih menguntungkan lelaki, sehingga mereka kurang mementingkan makna-makna demokrasi yang bersifat asertif. Pemaknaan demokrasi oleh perempuan menunjukkan perempuan belum merasa diperlakukan dengan adil oleh masyarakat.

Ideologi-ideologi gagasan demokrasi

Analisis multidimensional scaling ketiga dilakukan untuk mengetahui kedekatan antar gagasan dan pengelompokan gagasan-gagasan tersebut dengan mengabaikan tingkat usia maupun jenis kelamin. Hasilnya menunjukkan ada dua dimensi dasar yang menjadi kerangka bagaimana gagasan demokrasi diasimilasi oleh kaum muda dengan nilai stress sebesar 0,13734 dan RSQ sebesar 0,94335 yang menunjukkan bahwa pembentukan dua dimensi tersebut cukup memadai untuk menggambarkan data empiris.

Gambar 3.

Sebaran gagasan demokrasi dalam kerangka dua dimensi(1): integral vs liberal dan dimensi (2): keadilan vs kehendak rakyat



Dimensi pertama menunjukkan ketegangan antara gagasan-gagasan liberal: kebebasan mengekspresikan gagasan, keadilan serta kesetaraan dan pluralitas di sisi kiri lawan gagasan-gagasan yang menunjukkan perhatian pada pembentukan kolektivitas masyarakat seperti kesejahteraan, persatuan, hukum-ketertiban, jaminan hak asasi manusia, tanggungjawab dan kejujuran yang tampak

©2023 Hartoko

pada bagian kanan dari gambar berikut ini. Ketegangan ini secara negatif dapat dipahami sebagai perpecahan, namun secara positif dapat dimaknai sebagai ketegangan yang menumbuhkan model gagasan demokrasi komunitarian. Gagasan komunitarian merefleksikan keseimbangan antara keteraturan-ketertataan dengan otonomi (Etzioni, 1996). Kaum komunitarian menyetujui gagasan demokrasi liberal maupun partisipatori, namun integrasi dalam komunitas merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa kehadiran dalam komunitas secara organik otonomi individu menjadi sulit berkembang dan berubah menjadi atom-atom yang dapat dengan mudah digerakkan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Otonomi individu tanpa komunitas yang sehat hanya akan menjadi awal bagi penciptaan tenaga industrial maupun konsumer, seperti kritik yang dikembangkan teori kritis Frankfurt (Marcuse, 2002). Dalam konteks perkembangan sejarah Indonesia gagasan komunitarian ini termanifestasi secara parsial dalam negara kekeluargaan atau integralisme. Perbedaan mendasarnya ada pada pengakuan otonomi individu.

Dimensi kedua menunjukkan ketegangan antara gagasan-gagasan prinsip umum keadilan lawan pembentukan kehendak rakyat (musyawarah, kedaulatan rakyat, pemilu, kebersamaan). Pada dimensi kedua ini tampak bahwa gagasan-gagasan pembentukan kolektivitas atau komunitas mengantarai prinsip keadilan dan gagasan kehendak rakyat. Kehendak mayoritas yang menyerap prinsip keadilan dapat memelihara tumbuhnya komunitas yang sehat seperti yang digagas oleh demokrasi komunitarian.

Secara ideologis, hal-hal yang disebut di atas dapat ditempatkan dalam kontinuitas dan ketegangan antara cita-cita liberal dan keinginan untuk hidup dalam suasana harmoni a la ideologi integralistik. Ideologi liberal mengasumsikan individu yang otonom yang bersikap aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan melalui instrumen "kebebasan berpendapat" serta memiliki aspirasi terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi: keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan baik perbedaan pendapat maupun perbedaan cara hidup. Angan-angan negara harmoni memunculkan gambaran tentang persatuan, kedamaian dan kesejahteraan.

Apa yang tampak di dalam representasi sosial mengenai demokrasi ini adalah keserupaannya dengan debat ideologis yang cukup panjang mengenai apakah Indonesia sebaiknya ditata dengan cara negara kekeluargaan atau negara liberal yang seringkali ditambah "embel-embel" individualitik. Perdebatan tersebut sudah mulai mengemuka bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia misalnya dalam tulisan-tulisan mengenai polemik kebudayaan di tahun 1935 antara Sutan takdir Alihsyabana dengan Sanusi Pane (Mihardja, 1998). Juga muncul ketika para pendiri negara mendiskusikan bentuk negara Indonesia (Bourchier, 2007) hingga perbincangan-perbincangan politik sesudah tumbangnya Orde baru (Bourchier & Hadiz, 2003). Resonansi ini dapat berarti bahwa ketegangan tersebut benar-benar memperlihatkan ketegangan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun juga dapat berarti terjadinya hegemoni ideologi yang amat kuat sehingga bahkan dalam pikiran sehari-hari ketegangan tersebut muncul (Augostinos, 1998). Gagasan komunitarian yang muncul dalam pikiran sehari-hari kaum muda dapat dibaca secara positif sebagai upaya untuk mendamaikan ketegangan-ketegangan ideologis tersebut.

©2023 Hartoko

Gagasan anak muda tentang demokrasi terkait erat dengan motif personal, yaitu keprihatinan dasar yang muncul pada tahap perkembangan tertentu (otonomi dan generativitas) serta pengalaman historis tertentu (rasa ketidakadilan gender yang berkembang dalam masyarakat patriarkis) maupun dengan motif-motif ideologis yang berkembang dalam masyarakat (gagasan liberal dan komunitarian). Kajian representasi sosial ini dapat memperlihatkan bahwa pengetahuan atau pemahaman tentang suatu gejala sosial yang relatif cair seperti demokrasi tidak terlepas dari interaksi antara yang personal dan yang sosial. Dorongan-dorongan personal dapat diterima dalam realitas publik manakala dorongan tersebut dinyatakan dalam idiom-idiom yang dikenal dalam masyarakat, sebaliknya idiom-idiom yang berkembang dalam masyarakat dapat memiliki arti personal manakala idom-idiom tersebut bersesuaian dengan dorongan-dorongan personal. Pembedaan antara yang personal dan yang sosial menjadi sulit ditegakkan dalam pemahaman atau pengetahuan sehari-hari masyarakat.Pengetahuan sehari-hari tersebut kemudian dapat menjelma menjadi suatu kekuatan yang dapat saja mengarahkan jalannya dunia perpolitikan di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Pendekatan representasi sosial memungkinkan penelitian ini tidak hanya menemukan isi gagasan anak muda tentang demokrasi namun juga menemukan titik-titik di mana gagasan tersebut diartikulasikan, atau dengan kata lain kerangka dasar yang dipakai untuk menangkap pengertian demokrasi. Gagasan tentang demokrasi yang dimiliki anak muda awam berpusat di sekitar prinsip-prinsip dasar demokrasi (liberal), gagasan kedaulatan rakyat dan gagasan komunitarian yang oleh banyak pihak dipandang sebagai tipe-tipe idologi yang berbeda sehingga tidak mudah untuk didamaikan. Ketegangan makna demokrasi tersebut boleh jadi mencerminkan pengalaman berdemokrasi masyarakat Indonesia yang bergerak dari pandangan integralisme menuju demokrasi yang lebih menghormati otonomi individual dan asertivitas. Dari berbagai model gagasan tersebut kaum muda lebih cenderung mengutamakan gagasan demokrasi liberal yang menekankan pada kebebasan berbicara, pluralitas-kesetaraan dan keadilan dibanding gagasan lain.

Partisipan yang lebih muda (usia 17 sampai dengan 20 tahun) lebih mementingkan gagasan demokrasi liberal ketimbang gagasan yang terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan kolektivitas, sebaliknya partisipan lebih tua (usia 21 sampai dengan 33 tahun) lebih menekankan pada pembentukan dan pemeliharaan kolektivitas. Partisipan perempuan lebih mementingkan sikap kewargaan assertif khususnya keadilan, sedang partisipan lelaki lebih mementingkan sikap kewargaan loyal, khususnya pemilu. Pemaknaan terhadap demokrasi tidak saja mencerminkan motif-motif ideologi yang berkembang dalam masyarakat tetapi juga sekaligus mencerminkan pengalaman-pengalaman yang lebih personal.

©2023 Hartoko

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengandalkan satu sumber dokumentasi, yakni survei dengan pertanyaan terbuka. Ada banyak sumber lain yang mungkin dipakai untuk menangkap bagaimana masyarakat Indonesia memahami demokrasi. Penelitian selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi gagasan demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan perbincangan di dalam media sosial, maupun perbincangan sehari-hari tentang demokrasi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah gagasan-gagasan tersebut juga menjadi sarana untuk melegitimasikan suatu pemerintahan ataukah ia hanya sekedar pengetahuan belaka akibat proses pendidikan indoktrinatif tentang gagasan mengenai masyarakat yang baik yang mereka terima sebelumnya dari bangku sekolah. Di luar soal beberapa kemungkinan studi berikutnya, studi ini dapat memperlihatkan bahwa gagasan tentang demokrasi di dalam pikiran masyarakat memiliki konotasi yang bervariasi.

Ucapan Terimakasih

Peneliti merasa berhutang budi kepada Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sanata Dharma yang telah banyak memberikan bantuan di dalam pengumpulan data, maupun diskusi yang memperkaya wawasan peneliti terkait persoalan demorasi. Hasil penelitian dan pembahasan sepenuhnya merupakan tanggung jawab peneliti.

Daftar Acuan

Almond, G. D., & Verba, S. (1963). *The civic culture, political attitudes and democracy in five nations.* Sage Publications.

Augostinos, M. (1998). Social representations and ideology: towards the study of ideological representations. In U. Flick, *The Psychology of Social* (pp. 156-169). Cambridge University Press.

Barbu, Z. (2010). *Democracy and dictatorship their psychology and patterns of life.* Routledge.

Beetham, D., & Boyle, K. (2000). *Demokrasi 80 tanya jawab.* Kanisius.

Bourchier, D. (2007). *Pancasila versi orde baru dan asal muasal negara organis (integralistik).* Pusat Studi Pancasila UGM dan Aditya Media.

Bourchier, D., & Hadiz, V. R. (2003). *Indonesian politics and society.* RoutledgeCurzon.

Cunningham, F. (2002). *Theories of democracy: A critical introduction.* Routledge.

Dalton, R. J., & Welzel, C. (2014). *The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens.* Cambridge University Press.

©2023 Hartoko

Dalton, R. J., & Welzel, C. (2014). Political culture and value change. In R. J. Dalton, & C. Welzel (Eds.), *The Civic Culture Transformed Fromm Allegiant to Assertive Citizen* (pp. 1-18). Cambridge University Press.

Dalton, R., Shin, D., & Jou, W. (2007). Popular conceptions of the meaning of democracy: Democratic understanding in unlikely places. *CSD Working Papers*, Publication Date: 05-18-2007. https://escholarship.org/uc/item/2j74b860.

Erikson, E. H. (1987). *Childhood and society.* Paladin Grafton Book.

Etzioni, A. (1996). The responsive community: A communitarian perspective. *American Sociological Review, 61*(1), 1-11.

Flick, U. (1998). Introduction: social representations in knowledge and language as approaches to a psychology of the social. In U. Flick, *The Psychology of The Social* (pp. 1-14). University Press: Cambridge.

Hansen, M. A., & Goenaga, A. (2021). Gender and democratic attitudes: do woman and man prioritize different democratic institutions? *Politics & Gender, 17*(1), 23-52.

Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilization and the remaking of world order.* Simon & Schuster.

Kesici, S. (2008). Democratic teacher beliefs according to the teacher's gender and locus of control. *Journal of Instructional Psychology, 35*(1), 62-69.

Kim, S. Y. (2010). Do asian value exist? empirical tests of the four dimensions of asian values. *Journal of East Asian Studies, 10*(2), 315-344.

Marcuse, H. (2002). *One-dimensional man, studies in the ideology of advance industrial society.* Routledge Classics.

Mihardja, A. K. (1998). *Polemik kebudayaan.* Balai Pustaka.

Moodie, E., & Markova, I. (1995). Lay representation of democracy. A study in two culture. *Culture & Psychology, 1*, 423-453.

Moscovici, S. (1998). The history and actuality of social representations. In U. Flick, *The Psychology of The Social* (pp. 209-247). Cambridge University Press.

Przeworski, A. (2010). *Democracy and the limits of self-government.* Cambridge University Press.

Sotirakopoulou, K. P., & Breakwell, G. (1992). The use of different methodological approaches in the study of social representations. *On Going Production on Social Representations, 1*(1), 29-38.

von Cranach, M. (1998). The knowledge of social systems. In U. Flick, *The Psychology of The Social* (pp. 15-40). Cambridge University Press.

©2023 Hartoko

Welzel, C., & Dalton, R. (2016). Cultural change in Asia and beyond: From allegiant to assertive citizens. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-21.

Welzel, C., & Dalton, R. J. (2014). From allegiance to assertive citizen. In R. J. Dalton, & C. Welzel (Eds.), *The Civic Culture Transformed From Allegiant to Assertive Citizen* (pp. 282-306). Cambridge University Press.

©2023 Hartoko